

REAKSI INDIA TERHADAP STRATEGI *PEACEFUL DEVELOPMENT* CHINA DI SAMUDERA HINDIA TAHUN 2008-2018

Nora Saldia Haloho¹
Nim. 1402045072

Abstract

This research aims to explain India's Reactions towards China's Peaceful Development in Indian Ocean on 2008 to 2018. The research method uses descriptive research type with data sources obtained from books, journals, websites and news valid. In this research the author uses the concept of Balance of Power. The results of this research indicate that India shows its reactions towards China's Peaceful Development by joining defense cooperation with a stronger state, United States. The defense cooperation is manifested by increasing and modernizing India's Militar forces and joint military training between India, Japan and Unites States. By increasing and modernizing military forces, India succeeded in strengthening its domestic defense by increasing the annual military budget to modernize its army, naval and airforce military. Furthermore, on 2017 India, US and Japan organized joint military training on Bay of Bengal, part of Indian Ocean. The three countries agreed to strengthen security in Indian Ocean from China's agressive action by elaborating some cooperations in several sectors with the countries around Indian Ocean, they are Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka.

Keywords: China, Indian, Peaceful Development.

Pendahuluan

Perekonomian China meningkat drastis sejak diberlakukannya reformasi ekonomi tahun 1978. Peningkatan ekonomi tersebut didukung oleh perkembangan industrialisasi dalam negeri sehingga dalam kurun waktu tahun 1978 hingga 1995 China berhasil menjadi industri manufaktur terbesar di dunia (<http://www.worldbank.org>, diakses pada 23 Juni 2018). Perkembangan pada sektor industrialisasi tersebut membutuhkan sumber energi, khususnya energi minyak yang sangat besar sehingga pada tahun 1995 produksi minyak dalam negeri China tidak mampu mengikuti tingkat konsumsi yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan konsumsi minyak China.

Kondisi tersebut mengharuskan China untuk mencari sumber energi minyak diluar wilayahnya sehingga pada tahun 1997 China menjadi *net oil importer* dimana dalam

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nora.saldia96@gmail.com

pemenuhan energi minyaknya, China disuplai oleh beberapa negara di kawasan Timur Tengah yaitu, seperti Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, United Arab Emirates; kawasan Afrika, seperti Sudan, Angola, serta beberapa negara di kawasan Asia Tengah. Dalam kegiatan pengiriman minyak tersebut, China menggunakan jalur yang ada pada *Sea Lines of Communications* yang membentang dari Selat Hormus, Samudera Hindia, Selat Malaka hingga Laut China Selatan. Jalur tersebut dipilih oleh pemerintah China karena merupakan jalur tercepat yang menghubungkan China dengan negara-negara pengekspor minyak tersebut.

Ketergantungan China terhadap impor energi minyak tersebut menimbulkan kekhawatiran China terhadap kemungkinan terjadinya gangguan pada jalur yang dilalui oleh transportasi pengiriman minyak di sepanjang SLOC China berupa pembajakan dan tindakan terorisme yang dapat menghambat bahkan menghentikan kegiatan impor minyak tersebut. Kekhawatiran ini muncul karena jalur yang dilalui transportasi pengiriman minyak tersebut termasuk wilayah yang rawan kejahatan internasional

Dengan adanya kekhawatiran tersebut, pada tahun 2005 China menerapkan sebuah strategi yang disebut dengan *Peaceful Development* (<http://in.chineseembassy.org>, diakses pada 1 Desember 2017). Strategi *Peaceful Development* merupakan sebuah bentuk upaya China untuk menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara yang dilalui oleh kegiatan impor minyak China. Strategi tersebut memiliki tujuan utama, yaitu mengamankan jalur pengiriman minyak China mulai dari Selat Hormus, Samudera Hindia, Selat Malaka dan Laut China Selatan.

Implementasi dari strategi *Peaceful Development* ditegaskan dalam Buku Putih Pertahanan China tahun 2005 bahwa *Peaceful Development* memiliki 2 bentuk implementasi, yaitu pendekatan diplomasi dan pendekatan militer (<http://in.chineseembassy.org>, diakses pada 1 Desember 2017). Melalui pendekatan diplomasi, China mengimplementasikan strategi *Peaceful Development* dengan menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara yang dilalui oleh transportasi impor minyak China; sedangkan melalui pendekatan militer, China menempatkan sejumlah jaringan militer dan infrastruktur kemaritiman pada jalur pengiriman minyak tersebut.

Samudera Hindia sebagai salah satu jalur pengiriman minyak dalam strategi *Peaceful Development China* merupakan bagian lautan yang penting karena dilewati oleh lebih dari 50% perdagangan dunia. Melalui pendekatan diplomasi, China menerapkan strategi *Peaceful Development* di Samudera Hindia dengan menjalin hubungan kerjasama dengan Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan China dalam pembangunan beberapa proyek dan memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara tersebut (Okuda, 2016:45). Sedangkan melalui pendekatan militer, salah satu upaya yang dilakukan China dalam adalah mengirimkan kapal patroli ke daerah rawan pembajakan di kawasan Samudera Hindia dan menjadikan beberapa pelabuhan di negara tersebut sebagai pangkalan militer China.

Strategi *Peaceful Development* China ternyata menimbulkan respon dari berbagai negara. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Filipina mendukung dan mengambil keuntungan dari implementasi strategi tersebut. Sementara beberapa negara lainnya seperti Amerika, Australia, Jepang, dan Korea Selatan kurang mendukung adanya strategi China tersebut tetapi tidak memberikan respon secara langsung. Hal tersebut berbeda dengan India yang menjadi satu-satunya negara yang memberikan respon secara langsung dan terbuka terhadap strategi China tersebut. Bagi India, implementasi *Peaceful Development* di Samudera Hindia merupakan sebuah ancaman dan arena persaingan serta upaya China untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Selatan.

Hubungan kerjasama China dengan Pakistan, Bangladesh dan Sri Lanka dalam strategi *Peaceful Development* yang pada kenyataannya ketiga negara tersebut memiliki hubungan yang kurang baik dengan India merupakan sebuah bentuk pengepungan terhadap India dan perluasan wilayah pengaruh China di Asia Selatan. Tahun 1990, India-Sri Lanka terlibat konflik etnis antara mayoritas Sinhala dengan separatis Tamil. Tahun 1998, India-Pakistan terlibat uji coba senjata nuklir dan tahun 1999 keduanya terlibat konfrontasi bersenjata di wilayah Kargil, Kashmir. Berdasarkan hal tersebut, India khawatir bahwa melalui strategi *Peaceful Development*, China bekerjasama dengan Pakistan untuk mengembangkan senjata nuklir. Selanjutnya, tahun 2001 India dan Bangladesh terlibat konflik perbatasan di wilayah Pyrdiwah.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Balance of Power

Stephen M. Walt, dalam bukunya yang berjudul *Alliance Formation and The Balance of World Power* menuliskan bahwa suatu negara akan melakukan *balance of power* ketika sebuah aliansi yang dilakukan oleh negara tertentu menyebabkan pengepungan maupun penghambatan terhadap kekuatan pihak lain atau upaya menimbulkan efek gentar (Walt, 1985:4-20). Dalam pandangan Walt, suatu negara akan secara otomatis menyesuaikan diri ketika ada peningkatan kekuatan dari negara lain dalam suatu sistem dengan cara meningkatkan kekuatan dan modernisasi pertahanan militer dalam negaranya. Selain itu, negara tersebut juga akan melakukan upaya *balancing* dengan cara bergabung dengan *dominant power* yang dianggap lebih kuat untuk menyeimbangkan kekuatan dengan negara sumber ancaman. Bergabung dengan kekuatan yang lebih besar berarti menempatkan kepercayaan pada kebijakan negara tersebut. Dalam hal ini, strategi yang lebih aman adalah memilih untuk bergabung dengan negara dengan *power* yang dominan tetapi tidak mendominasi negara-negara aliansinya dengan mudah.

Menurut Walt, suatu negara yang memilih untuk melakukan tindakan *balance of power* akan lebih aman karena negara yang menjadi sumber ancaman (*agressor*) akan menghadapi dua atau lebih kekuatan gabungan. Sehingga negara *agressor* akan menghadapi kesulitan dalam menentukan fokusnya terhadap negara-negara tersebut. Dalam kondisi tersebut, biasanya perang tidak akan terjadi karena kedua pihak, baik negara *agressor* maupun negara yang terancam (didukung oleh negara aliansinya) memiliki kekuatan yang seimbang. Oleh karena itu, kedua negara akan

mempertimbangan terlebih dahulu jika ingin melakukan perang karena peluang akan besarnya kerugian sangat mungkin pada kedua negara tersebut.

Adapun alasan dari suatu negara melakukan tindakan *balance of power* adalah bahwa suatu negara akan kehilangan kelangsungan hidup negaranya ketika negara tersebut gagal untuk mengekang hegemoni yang mengancam negaranya. Dengan kata lain, ketika suatu negara membiarkan sebuah hegemoni menjadi semakin kuat terhadap negaranya maka sama saja negara tersebut membahayakan negaranya sendiri. Maka bergabung dengan *dominant power* menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk menghambat perluasan hegemoni dan meminimalisir terjadinya kekalahan dari negara *agressor*.

Tujuan dari suatu negara dalam melakukan *balance of power* adalah untuk mencapai ekuilibrium (keseimbangan). Ekuilibrium akan tercapai hanya jika variabel-variabel (seperti kekuatan militer atau sikap dan kebijakan) dari setiap negara berada pada posisi sejajar dan tidak ada satu negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar atas negara lainnya. Pendekatan ini berasumsi bahwa selama masih ada kekuatan yang sama antara dua aktor atau lebih, maka kebijakan mereka akan tetap moderat dan upaya salah satu aktor yang ingin memperoleh posisi hegemoni kemungkinan besar bisa digagalkan.

Dalam penelitian ini, tindakan China dengan cara menjalin hubungan kerjasama dengan negara Pakistan, Sri Lanka dan Bangladesh serta penempatan kekuatan militernya di Samudera Hindia dianggap sebagai bentuk pengepungan terhadap India dan upaya perluasan wilayah pengaruh China secara tidak langsung di kawasan Asia Selatan. Oleh karena itu, India memberikan reaksinya terhadap strategi *Peaceful Development* dengan cara melakukan *balance of power*.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-eksplanatif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode *content analysis* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi sehingga didapat analisa yang relevan atas permasalahan yang ada.

Hasil Penelitian

Sejak tahun 1997, nilai impor minyak China semakin meningkat dengan jumlah produksi dalam negeri yang masih stagnan. Hal tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah China dimana jalur yang dilalui oleh kegiatan pengiriman minyak China dari Timur Tengah dan Afrika adalah jalur yang rentan pembajakan dan tindakan kejahatan laut lainnya.

Salah satu jalur dalam pengiriman minyak China adalah Samudera Hindia yang merupakan salah satu wilayah perairan tersibuk di dunia karena sekitar 75% kegiatan perdagangan dunia melewati wilayah tersebut. Samudera Hindia merupakan lautan dengan luas mencapai 73,3 km² dengan kedalaman rata-rata mencapai 3.890 m dan titik terdalam mencapai 7.725 m. Samudera Hindia memiliki volume air sekitar 292.131.000 km³ dan juga terdapat lima punggung laut besar di Samudera Hindia

yang berpusat di satu titik, yaitu punggung Laut Hindia Barat Daya, Hindia Tenggara, Sicilia, Nikety Timur, dan Chagos Lachandive. Sebagai wilayah perairan tersibuk di dunia, wilayah perairan Samudera Hindia seringkali terjadi tindakan pembajakan terhadap kapal-kapal yang melintas. Berikut adalah data kasus pembajakan di wilayah Samudera Hindia tahun 2001 hingga 2005:

Data kasus pembajakan di Samudera Hindia tahun 2001-2005

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah	23	20	22	23	16

Selain kasus pembajakan, terdapat juga sengketa wilayah diantar negara-negara yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah sengketa antara Sri Lanka dan India di Selat Palk pada tahun 2004. Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan antar kedua negara pada bulan Oktober 2001, nelayan India dengan lisensi yang sah diizinkan untuk memancing di Selat Palk yang merupakan bagian dari wilayah perairan Sri Lanka. Namun pada tahun 2004, nelayan India memancing dengan sesuka hati dan menggunakan kapal pukat. Hal tersebut tentu merugikan nelayan Sri Lanka yang semakin kesulitan dalam mencari ikan karena kapal pukat dapat merusak ekosistem air. Pemerintah Sri Lanka meminta India untuk menghentikan penggunaan kapal pukat mekanik tersebut di Selat Palk namun India tidak memberikan respon. Sehingga terjadi bentrok antara nelayan Sri Lanka dan India di wilayah perairan Selat Palk, tepatnya di Katchatheevu.

Selain itu, Bangladesh dan Myanmar juga pernah terlibat sengketa terkait eksplorasi minyak dan gas di wilayah Teluk Benggala. Konflik tersebut terjadi karena belum adanya kesepakatan terhadap garis batas landas kontinen antara kedua negara. Konflik tersebut berawal ketika Myanmar melakukan pengeboran minyak di Teluk Benggala pada tahun 2003 tanpa persetujuan Bangladesh yang menganggap bahwa tempat tersebut merupakan wilayah teritorialnya. Hal tersebut memicu kemarahan dari Bangladesh. Ketegangan semakin meningkat ketika Myanmar mengirimkan kapal perang untuk mengawasi kegiatan pengeboran minyaknya di Teluk Benggala. Akhirnya pada bulan Oktober 2004, kedua negara mengerahkan kekuatan militer masing-masing ke wilayah perbatasan. Pada tanggal 4 November 2005, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara hukum melalui *International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*.

Tinggiya ketergantungan China terhadap impor minyak dan kerentanan pada jalur pengiriman minyak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah China. Kondisi tersebut disadari oleh Hu Jintao, Presiden China tahun 2003-2013. Pada tahun 2005, pada acara *World Economic Forum* di Sanya, China, Presiden Hu Jintao dalam pidatonya yang berjudul “*The 16th National Congress of the Communist Party of China and China’s Peaceful Development – A New Path*” memperkenalkan konsep *Peaceful Development* (和平崛起 – *Heping Fazhan*) (<http://in.chineseembassy.org>, diakses pada 1 Desember 2017) Hu Jintao menyampaikan bahwa *Peaceful Development* adalah upaya China untuk mengikuti tatanan dunia yang ada dengan dukungan terhadap perekonomian yang kooperatif dan kerjasama keamanan, khususnya keamanan energi minyak. Ia juga menegaskan bahwa upaya ini dilakukan

untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang terlibat dan dilalui oleh kegiatan impor minyak China. Tujuan utama dari *Peaceful Development* tertuang dalam *China's Energy Policy 2005* (<http://english.gov>, diakses pada 2 Desember 2017), yaitu mengamankan jalur pengiriman minyak China yang berada di sepanjang SLOC China, yaitu Selat Hormus, Samudera Hindia, Selat Malaka, dan Laut China Selatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:

Peta Rute Impor Minyak China



Dalam implementasinya, strategi *Peaceful Development* difokuskan terhadap keamanan di wilayah Samudera Hindia dimana wilayah tersebut merupakan wilayah perairan paling rawan tindakan kejahatan laut. Strategi *Peaceful Development* China di Samudera Hindia memiliki dua bentuk, yaitu pendekatan diplomasi dan pendekatan militer.

1. Pendekatan Diplomasi

Bentuk kerjasama diplomasi yang dijalankan oleh China terhadap negara-negara di Samudera Hindia merupakan diplomasi dalam bidang ekonomi melalui bantuan-bantuan guna meningkatkan ekonomi dan pembangunan beberapa infrastruktur pada beberapa titik. Hal tersebut dilakukan oleh China dengan alasan bahwa negara-negara di Samudera Hindia yang dilalui oleh jalur impor minyak dari Timur Tengah dan Afrika memiliki tingkat perekonomian yang belum stabil dan sangat membutuhkan dukungan dari negara lain.

Sementara bagi China, kepentingannya juga akan tercapai dimana China berharap negara-negara tersebut (Pakistan, Sri Lanka dan Bangladesh) bersedia untuk menjadi titik transit dalam aktivitas impor minyak China dari Timur Tengah dan Afrika. Oleh karena itu, dengan adanya pendekatan diplomasi di bidang ekonomi tersebut negara-negara yang terlibat baik China maupun Pakistan, Sri Lanka dan Bangladesh dapat membentuk suatu interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain. Salah satu proyek yang dijalankan China dengan Pakistan sejak tahun 2006 adalah pembangunan Pelabuhan Gwadar dengan nilai sebesar US\$ 1,2 Milyar. Pelabuhan Gwadar dipilih oleh China sebagai titik transit dalam aktivitas pengangkutan minyak dari Teluk Persia menuju China. Jarak pelabuhan Gwadar yang dekat dengan Selat Hormuz dan Iran dinilai sebagai keuntungan geostrategis untuk menjadi titik transit impor minyak China dari Iran dan Afrika. Selain itu, pada tahun 2013 Pakistan dan China juga bekerjasama dalam pembangunan rel kereta api sebesar US\$ 3,7 juta yang menghubungkan kedua negara.

Hubungan kerjasama antara China dan Pakistan juga terjalin dalam bidang pengembangan nuklir Pakistan. Pilar hubungan kerjasama China dan Pakistan dalam pengembangan senjata nuklir ini dikenal dengan istilah *Sino-Pakistan Relations*. Pada periode tahun 2011 hingga 2015, kontribusi China terlihat sangat kuat dalam pengembangan nuklir Pakistan dalam pembangunan proyek nuklir di Pelabuhan Karachi, Pakistan. Hal ini terbukti dalam Dokumen Pembiayaan Pengembangan Nuklir Pakistan yang menunjukkan bahwa *China National Nuclear Cooperation* (CNNC) telah memberikan dana bantuan sebesar US\$ 6,5 Milyar untuk pengembangan proyek nuklir Pakistan yang memiliki dua reaktor dengan kapasitas masing-masing adalah 1.100 Megawatt.

Selain itu, sejak tahun 2006, China juga menjadi mitra dagang terbesar Bangladesh. China berinvestasi di sektor tekstil, energi dan infrastruktur di Bangladesh. Pada tahun 2006 hingga 2008, perdagangan antar kedua negara meningkat 28,5% dan China memberikan akses bebas tarif bagi komoditas Bangladesh yang masuk ke pasar China. Pada tahun 2009, Bangladesh mendapat pinjaman dana sebesar US\$ 211 juta dari China yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas telekomunikasi dan membangun jalan sepanjang 900 km dari kota Chittagong ke Kunming. Selanjutnya, proyek utama dalam kerjasama China dan Bangladesh adalah pembangunan proyek *deep sea water port* atau Pelabuhan Chittagong pada tahun 2010 yang merupakan realisasi dari ratifikasi *China-Bangladesh Joint Statement* dalam kunjungan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina ke China.

Selain itu, hubungan China dan Sri Lanka dengan ditandatanganinya *China-Sri Lanka Joint Communique* pada bulan September 2009. China berinvestasi besar-besaran terhadap Sri Lanka dengan menyediakan pinjaman bebas bunga atau pinjaman bersubsidi. Sebagai hasilnya, bantuan dan investasi komersial China meningkat sangat pesat selama masa pemerintahan Presiden Rajapakse. Proyek utama dari kerjasama kedua negara ini adalah pelabuhan Hambantota yang bernilai US\$ 1 Milyar. Pelabuhan Hambantota berperan sebagai *back up* jika pelabuhan Gwadar di Pakistan jatuh kepada gerakan *Balochistan* yang menilai bahwa pelabuhan tersebut merupakan simbol eksploitasi China di Pakistan. Selain pembangunan Pelabuhan Hambantota, China juga turut berkontribusi dalam pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara Norochcolai dan jalur ekspres Colombo Katunayake.

2. Pendekatan Militer

Keterlibatan militer menjadi salah satu indikator dalam strategi *Peaceful Development* China demi menjaga keamanan energinya. Pada awalnya, China tidak menghadirkan kekuatan militernya secara langsung di Samudera Hindia dalam rangka mengamankan jalur pengiriman minyak dari Timur Tengah dan Afrika. Pada periode tahun 2005 hingga 2010, China masih berfokus pada hubungan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Samudera Hindia, yaitu Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Namun, memasuki tahun 2011 China mulai melibatkan kekuatan militernya ke kawasan tersebut.

Pada bulan April 2011, Kolonel Yang Yujun, Juru Bicara Departemen Pertahanan Nasional China menegaskan bahwa Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat

(PLAN) akan mengerahkan beberapa kapal angkatan laut ke wilayah Samudera Hindia. Yang Yujun menyatakan bahwa keterlibatan kapal-kapal angkatan laut tersebut berfungsi untuk mewaspadai terjadinya kejahatan maritim seperti pembajakan yang dapat memberikan dampak yang sangat signifikan bagi aktivitas impor minyak China di kawasan Samudera Hindia. Pada bulan Juni 2011, untuk pertama kalinya China mengirimkan tiga unit kapal tipe 052C yang dilengkapi dengan rudal perusak *Haikou* berlayar di Samudera Hindia, tepatnya di Teluk Aden.

Tahun 2015, China mengirimkan sebuah kapal selam dan kapal amfibi dengan kapasitas 30.000 ton serta tiga kapal tangki yang kembali memasuki wilayah Samudera Hindia. Media lokal China, *Weibo*, menegaskan bahwa kapal-kapal tersebut digunakan untuk latihan penyerangan terhadap kapal perompak dan latihan penyelamatan di Samudera Hindia. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2016, China kembali mengirimkan kapal selam kelas diesel, *Yuan* dan kapal selam *Chongmingdao* serta kapal intelijen *Haiwingxin*. Ketiga kapal tersebut melakukan patroli di wilayah Teluk Bengal, salah satu wilayah di Samudera Hindia yang rawan tindakan pembajakan. Namun, selama dua bulan sebelumnya, Satelit Angkatan Laut India GSAT-7 melaporkan bahwa terdapat 13 kapal angkatan laut China yang telah melakukan patroli di wilayah Samudera Hindia.

Strategi *Peaceful Development* yang diterapkan oleh China pada tahun 2005 ternyata mendapat respon dari negara lain. Ada beberapa kelompok negara yang mendukung sekaligus mengambil keuntungan dari strategi *Peaceful Development* China dan ada juga yang mewaspadai. Negara yang mendukung strategi tersebut adalah Myanmar, Filipina, Vietnam, Thailand, Singapura, Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan Sri Lanka. Selain negara yang mendukung strategi *Peaceful Development*, terdapat beberapa kelompok negara yang mewaspadai strategi tersebut, seperti Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan India.

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di bagian Selatan dan juga dengan jumlah populasi terbesar di Asia Selatan serta dengan warisan kejayaan dinasti-dinasti India pra-kolonial, dominasi terhadap Samudera Hindia merupakan suatu takdir bagi India. Dalam hubungannya dengan strategi *Peaceful Development*, kehadiran China di Samudera Hindia dengan kekuatan militer dan pendekatan diplomasinya memunculkan kekhawatiran bagi India. Melalui Sekretaris Negara India, Rajiv Sikri dengan tegas mengatakan bahwa tindakan China melalui strategi *Peaceful Development* merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji dan berpotensi menimbulkan konflik (Brewster, 2010: 1-20). Mantan Menteri Luar Negeri India, Jaswant Singh mengatakan bahwa hubungan diplomasi China dengan negara-negara di Samudera Hindia dan kehadiran kekuatan militernya merupakan tindakan yang berlebihan dan bukan sekedar mengamankan jalur pengiriman minyak melainkan upaya perluasan wilayah pengaruh China di Samudera Hindia.

Sesuai dengan teori *Balance of Power* yang dikemukakan oleh Walt bahwa suatu negara akan melakukan *balance of power* ketika sebuah aliansi yang dilakukan oleh negara tertentu menyebabkan pengepungan maupun penghambatan terhadap kekuatan pihak lain atau upaya menimbulkan efek gentar. Jashwant Singh menegaskan bahwa

beberapa proyek pembangunan yang dilakukan China, khususnya pembangunan pelabuhan yang dijadikan sebagai pangkalan militer di beberapa negara di sekitar Samudera Hindia merupakan bentuk upaya China untuk menunjukkan kekuatannya di Asia Selatan dan pengepungan terhadap India tepat di halaman belakangnya. Walt juga menegaskan bahwa suatu negara akan secara otomatis menyesuaikan diri ketika ada peningkatan kekuatan dari negara lain yang dianggap berpotensi membahayakan kelangsungan hidup negaranya. Dalam hal ini, negara yang terancam akan meningkatkan *power* (pertahanan militer) demi menyelamatkan kedaulatan negara dari ancaman negara lain.

Teori ini sesuai dengan tindakan India dalam memberikan reaksi terhadap strategi *Peaceful Development* China. Oleh karena itu, dalam upaya mempertahankan keselamatan negaranya, India memberikan terhadap strategi tersebut dengan menjalin kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Sebagai bentuk realisasi dari kerjasama tersebut, pada tanggal 28 Juni 2008 India-AS menyepakati sebuah kerjasama yang beragendakan "*New Framework For The US-India Defense Relationship*" yang ditandatangani oleh kedua kepala negara di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dalam acara *US-India Summit* (<https://idsa.in/resources/documents>, diakses pada 20 Maret 2018). Kerjasama tersebut menandai kerjasama pertahanan kedua negara yang berlaku selama sepuluh tahun (2008 hingga 2018) dan akan diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua pihak yang bersangkutan.

Kerjasama pertahanan AS-India tersebut tentunya didasari oleh kepentingan dari kedua negara. Bagi Amerika Serikat ada dua alasan penting yang mendorong Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama dengan India. Pertama, India memiliki kapabilitas angkatan laut terbesar dan mumpuni di kawasan Asia Selatan. Selain itu, India memiliki perspektif dan nilai-nilai yang sama dengan Amerika Serikat dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi jalur komunikasi laut di kawasan. Melalui usaha bersama kedua negara berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan stabil di kawasan Samudera Hindia. Kedua, melihat kebangkitan hegemoni China, Amerika Serikat memandang bahwa India merupakan *partner* yang tepat dan dapat diandalkan berdasarkan kebijakan baru Amerika Serikat, yaitu *Pivot to Asia* yang merupakan ambisi Amerika Serikat untuk mempertahankan eksistensinya di kawasan Asia dan tetap menjadi *balancer actor* di kawasan tersebut.

Sementara bagi India, alasan utama dalam memilih Amerika Serikat sebagai *partner* dalam upaya memperkuat pertahanan di kawasan Samudera Hindia adalah bahwa Amerika Serikat dipandang sebagai negara yang kuat dalam bidang pertahanan dan kedua negara telah menjalin hubungan kerjasama di berbagai sektor pada tahun-tahun sebelumnya dan juga tidak terlepas dari adanya kesamaan perspektif dalam mencegah hegemoni China di kawasan Samudera Hindia (Anggara, 2015 : 8-14).

Terdapat empat hal penting yang disepakati dalam *New Frame Work For The US-India Defense Relationsip* tersebut, yaitu:

1. Memperkuat pertahanan keamanan di kawasan, dalam hal ini Samudera Hindia
2. Mencegah penyebaran senjata pemusnah massal, material, data, dan teknologi dari ancaman luar
3. Menjaga arus bebas perdagangan melalui jalur darat, darat dan laut

4. Mengantisipasi terjadinya tindakan pembajakan, terorisme dan segala bentuk kejahatan di kawasan Samudera Hindia
5. pengembangan dan produksi bersama.

Sebagai realisasi dari kerjasama pertahanan tersebut, AS-India melakukan dua hal penting, yaitu modernisasi kekuatan militer India dan latihan militer gabungan.

Memperkuat dan Modernisasi Pertahanan Militer

Para *desicion maker* India telah menegaskan bahwa India akan melakukan modernisasi militer yang diarahkan untuk mengawasi dan mencegah perkembangan agresivitas China di Samudera Hindia. Peningkatan militer tersebut tidak hanya dilakukan dalam satu aspek melainkan semua aspek termasuk militer angkatan darat, laut, dan udara. Upaya peningkatan kemampuan militer India diawali dengan peningkatan anggaran militer sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Peningkatan Anggaran Militer India

No	Tahun	SUSD (Billion)
1	1991-1996	11,32 - 12,77
2	1997-2002	17,14 - 18, 25
3	2003-2008	18,66 – 26,05
4	2009-2012	37,08 – 44,28

Dari data tersebut terlihat bahwa anggaran militer India meningkat jauh lebih besar pada tahun 2003-2008 setelah penerapan strategi *peaceful development* China pada tahun 2005. Selain itu, Menteri Keuangan India, Arun Jaitley mengatakan anggaran pertahanan meningkat menjadi 52,1 US\$ pada tahun 2015 dan 61,1 US\$ (melampaui Rusia dan Arab Saudi) pada tahun 2017 serta menegaskan bahwa India akan mempertahankan setiap jengkal wilayahnya di Samudera Hinda dari kekuatan manapun termasuk kehadiran China di kawasan Samudera Hindia melalui strategi *Peaceful Development* (<https://dunia.tempo.co>, diakses pada 19 Maret 2018). Hal ini menunjukkan bukti yang serius dari India dalam membangun sebuah strategi keamanan yang komprehensif dalam mengamankan wilayah dan kepentingan nasionalnya di Samudera Hindia. Anggaran militer India tersebut digunakan untuk pengembangan kekuatan militer India dalam semua aspek termasuk kekuatan militer angkatan darat, laut dan udara.

a. Modernisasi Kekuatan Angkatan Udara

India melakukan beberapa tindakan dalam upaya memperkuat dan modernisasi pertahanan udaranya. Pada tahun 2010, India untuk pertama kalinya mengakuisisi tiga pesawat peringatan dini dan kontrol udara atau *Airborne Early warning And Control* (AEW & C) untuk *Indian Air Force* (IAF) yang menghabiskan dana sebesar US\$ 358 juta (<https://dunia.tempo.co> diakses pada 19 Maret 2018).

Selain itu, angkatan udara Amerika Serikat juga telah melatih 135 personil angkatan udara India (pilot, *loadmaster* dan teknisi). Tak hanya itu, kontribusi dari Amerika Serikat juga terlihat dalam beberapa kali pelaksanaan *Air show* AEROINDIA dan kegiatan tahunan DEFEXPO menunjukkan ambisi yang serius dari industri pertahanan Amerika Serikat dalam pasar pertahanan India. Landasan

pesawat di *Blair Port* sepanjang 11.500 ft juga disiapkan untuk mengakomodasi pesawat berukuran besar seperti Boeing 747 (Athwal, 2008 : 63).

Pada bulan Juni 2017, Amerika Serikat mengirimkan dua pesawat pengintai pasca kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Washington, DC. Pada bulan yang sama, firma industri alutsista Amerika Serikat, Lockheed Martin akan merakit jet tempur F-16 di India setelah New Delhi menandatangani kontrak kerjasama militernya dengan Gedung Putih.

b. Modernisasi Kekuatan Angkatan Darat

Kekuatan angkatan darat India merupakan kekuatan angkatan darat terbesar di kawasan Asia selatan dengan jumlah personil aktif sebesar 1,1 juta pada kurun waktu tahun 2000 hingga 2002. Angkatan darat India memiliki kekuatan personil aktif terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Dengan peningkatan anggaran militer India sejak tahun 2008, angkatan militer India meningkat menjadi 2,4 juta jumlah personil aktif pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa India juga memiliki kekuatan militer angkatan darat yang sangat diperhitungkan oleh dunia. Berikut adalah data kekuatan militer angkatan darat India:

Data Kekuatan Militer Angkatan darat India

Tahun	Personil Aktif	Personil Cadangan	Tank	Peluncur Roket	Meriam
2004	1.229.900	1.255.100	2.415 unit	83 unit	2.145 unit
2006	1.259.900	1.275.120	2.415 unit	91 unit	2.503 unit
2008	1.534.200	1.689.167	2.850 unit	142 unit	2.832 unit
2010	1.820.200	1.912.101	2.931 unit	164 unit	2.900 unit
2012	2.292.600	2.380.100	3.231 unit	180 unit	2.993 unit
2014	2.485.111	2.712.113	3.592 unit	196 unit	3.205 unit
2016	2.512.223	2.890.122	3.685 unit	247 unit	3.423 unit
2017	2.624.544	2.988.876	3.741 unit	261 unit	3.663 unit

Sumber : *Military Analysis India Navy 2018*

Tabel diatas menunjukkan bahwa kekuatan militer angkatan darat India pada tahun 2004 hingga tahun 2006 hanya mengalami sedikit peningkatan. Namun, pada tahun 2008, kekuatan militer angkatan darat baik personil beserta beberapa peralatan militer lainnya mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2006. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Militer Angkatan Darat India bahwa salah satu indikator penyebab peningkatan tersebut dipengaruhi oleh implementasi strategi *Peaceful Development* China di Samudera Hindia (Grant, 2015:1-5).

Sebagai bentuk keseriusan dari pemerintah India dalam memperkuat pertahanan darat, India mengeluarkan anggaran sebesar 50,3% dari total anggaran pertahanan pada tahun 2012-2013. Dalam upaya untuk meningkatkan pertahanan di sepanjang Fron Timur-Utara, angkatan darat India telah membuat dua divisi infanteri dengan 15.000 personil yang masing-masing dibawah Komando Timur angkatan darat India. Divisi ini menjadi bagian dari *Mountain Strike Corps*, divisi baru yang disetujui oleh Kementerian Pertahanan India dengan biaya sebesar 640 Rupee.

c. Modernisasi Kekuatan Angkatan Laut

Dalam memperkuat pertahanan maritim di Samudera Hindia, India menerapkan doktrin kekuatan maritim berbasis “*blue water navy*” dengan wilayah operasi yang lebih luas untuk mengantisipasi perkembangan angkatan laut China serta menjamin kekuatan maritim yang kuat di wilayah Samudera Hindia. Motivasi *Blue water Navy* ini dipicu oleh kehadiran China di Samudera Hindia. Sebagaimana ditegaskan oleh Laksamana Sureesh Mehta bahwa melalui operasi angkatan laut lintas teritorial dan menempatkan angkatan laut di tempat yang lebih jauh akan meningkatkan martabat bangsa.

Sebagai bentuk keseriusan India dalam memperkuat angkatan lautnya, India semakin meningkatkan kapabilitas persenjataan terutama angkatan laut termasuk kapal induk, kapal selam dan kaman perusak. Teknologi rudal maritim India semakin meningkatkan kekuatan maritimnya dengan kehadiran rudal dengan jarak jelajah menengah (BrahMos) yaitu 500-650 km yang melengkapi angkatan laut India. Selain itu, India juga berhasil memproduksi Kapal INS Trikan pada tahun 2008 dan diuji coba secara resmi pada tahun 2013. Kapal tersebut dilengkapi dengan sistem anti kapal dengan peluncuran rudal vertikal serta dilengkapi rudal BrahMos India (Asia Pasific Buletin: 192).

Selanjutnya, India dan Amerika Serikat bekerjasama dalam pembuatan teknologi kapal induk saat kunjungan Presiden Obama ke India pada bulan Juli 2011. Kepala *US Naval Operations*, John Richardson, mengatakan bahwa kedua pihak telah mengadakan perundingan tentang berbagai hal terkait dengan desain konstruksi kapal India tersebut. Pada bulan Agustus 2013, Amerika Serikat dan India berhasil membuat sebuah kapal, INS *Jalashwa* yang menambah kapasitas kekuatan amphi angkatan laut India. Kapal tersebut mampu membawa empat landing craft, enam helikopter, dan batalion dengan 1000 personil bersenjata lengkap.

India dan Amerika Serikat juga berhasil membangun Fregat siluman yang mulai beroperasi pada bulan April 2014 (INS Shivalik), Agustus 2015 (INS Satpura), dan Juli 2016 (INS Syahdari) sebagai upaya dalam mengembangkan strategi *Blue water Navy* demi memperkuat pertahanan di Samudera Hindia dengan bantuan dana dari Amerika Serikat sebesar US\$ 8,5 juta (Scott, 2013 : 484-511). Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah India dalam menjaga wilayah kedaulatan dan mempertahankan eksistensinya sebagai *emerging power* di kawasan Samudera Hindia sekaligus merespon tindakan China melalui strategi *Peaceful Development* yang dipandang sangat kontroversi oleh India

Latihan Militer Gabungan (India – AS – Jepang)

New Framework For The US-India Defense Relationship menandai fenomena baru dalam arena pertahanan India dimana untuk pertama kali secara formal India dan Amerika Serikat mengumumkan untuk memperkuat kerjasama melalui latihan militer gabungan. *Shatrujeet* merupakan latihan gabungan angkatan laut India dan Amerika Serikat yang diadakan setahun sekali sejak tahun 2010. Latihan ini fokus pada doktrin amphi dan operasi. *Yudh Abhyas* merupakan latihan gabungan militer angkatan darat kedua negara yang diadakan sejak tahun 2011. Sedangkan *Cope India*

merupakan latihan tahunan militer angkatan udara dari kedua negara yang diadakan sejak tahun 2010. Latihan gabungan yang diadakan oleh angkatan laut India dengan angkatan laut Amerika Serikat melibatkan kontrol laut dan pertahanan udara.

Memasuki tahun 2017, hubungan kerjasama pertahanan India dengan Amerika Serikat semakin meluas. Sebelumnya, latihan militer antara angkatan laut India dengan Amerika Serikat telah berlangsung sejak tahun 2010. Namun, pada tahun 2017, selain India dan Amerika Serikat sebagai peserta tetap yang mengikuti latihan militer gabungan di Samudera Hindia, Jepang kini menjadi peserta tambahan dalam latihan militer gabungan atau dikenal dengan *Malabar exercise* (<https://www.liputan6.com>, diakses pada 4 september 2018). Perencanaan latihan tersebut dilakukan pada tanggal 22 – 23 Juli 2016 dimana para kepala militer ketiga negara, yaitu Amerika Serikat, India dan Jepang mengadakan pertemuan di pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Yokosuka, Jepang dalam rangka mempersiapkan latihan militer tersebut (<https://www.voaindonesia.com>, diakses pada 24 Juni 2018).

Pelaksanaan latihan gabungan tersebut merupakan kelanjutan dari simbolisasi hubungan bilateral AS - India di sektor militer. Penumpukan armada angkatan laut tiga negara tersebut terjadi ketika India dan China mengalami ketegangan antar kedua negara. Pakar Hubungan Internasional dari India menegaskan bahwa latihan militer gabungan tersebut menjadi simbolisasi komitmen India beserta Amerika Serikat dan Jepang untuk bekerjasama dalam menjaga keamanan di kawasan perairan Samudera Hindia.

Kesimpulan

Dari beberapa tindakan India dalam merespon strategi *Peaceful Development China*, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan kekuatan antara India dan China di Samudera Hindia dapat dikatakan berhasil dan tercapai dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat. Hal tersebut terbukti dengan kualitas dan kuantitas kekuatan militer India yang tidak kalah dari kekuatan China di Samudera Hindia.

Namun, hal berikutnya yang kemungkinan akan terjadi adalah kedua negara akan terlibat dalam kondisi bersitegang satu sama lain dalam waktu yang lama walaupun potensi untuk terjadinya perang secara terbuka sangat kecil. Hal tersebut sesuai dengan kelemahan dari teori *Balance of Power* yang dikemukakan oleh Walt bahwa ketika dua negara atau lebih telah mencapai titik ekuilibrium (keseimbangan), ketegangan antarnegara yang terlibat cenderung berlangsung lama walaupun perang sangat jarang terjadi karena kedua negara akan mempertimbangkan kerugian yang akan terjadi jika memutuskan untuk perang.

Daftar Pustaka

Amardeep, Athwal. *China – India Relations Contemporary Dynamics*, London: Routledge, 2008

Anggara, Hetri Pima, *Strategi India Menghadapi Hegemoni Tiongkok di Wilayah perairan Samudera Hindia*, Skripsi, Universitas Riau, 2015, Vol.2, No.2

- Brewster, David, *China's Sphere of Influence in the Indian Ocean*, Security Challenges, 2010, Vol.6, No.3
- Embassy of The People's Republic Of China in the Republic Of India, 2005, *White Paper: China's Peaceful Development*, tersedia dalam: <http://in.chineseembassy.org/eng/zt/peaceful/t855717.htm>
- Grant, Charles, *India And China's Peaceful Development*, 2015, Journal: Center for European Reform Policy Brief
- Hadapi Pengaruh China, India Naikkan Anggaran Pertahanan*, tersedia di :<https://dunia.tempo.co/read/646206/hadapi-pengaruh-cina-india-naikkan-anggaran-pertahanan>
- India Peringatkan Sri Lanka Soal Kehadiran Kapal-Kapa China*, tersedia dalam : <https://www.voaindonesia.com/a/india-peringatkan-sri-lanka-/2510169.html>
- Institute For Defense Studies and Analysis, Document: *New Framework For The India-US Defense Relationship*, tersedia dalam <https://idsa.in/resources/documents/Ind-US-Def-Rel-28.06.05>
- Okuda, Hiroko, *China's Peaceful Rise/Peaceful Development: A Case Study Of Media Frames Of The Rise Of China*, Skripsi, College Of Interhuman Symbiotic Studies, Kanto Gakuin University, 2016, Vol. I
- The State Council of The People Republic Of China, *China's Energy Policy 2005*, 2005, tersedia dalam: http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284499.htm
- Tuwo, Andreas Gerry, *Samudera Hindia 'Titik Panas' Dunia Setelah Laut China Selatan*, tersedia dalam : <http://www.liputan6.com/global/read/2884950/samudra-hindia-titik-panas-dunia-setelah-laut-china-selatan>
- Scott, David, *India's Aspirations and Strategy for the Indian Ocean – Securing the Waves?*, The Journal of Strategic Studies: UK, 2013
- Walt, Stephen M., *Alliance Formation and The Balance of World Power*, The MIT Press : International Security, 1985, Vol. 9, No. 4
- World Bank, *World Economic Growth*, tersedia dalam: <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2005/06/07/World-economy-growth>